

**PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL DAN INTEGRASINYA DENGAN
DATA SPASIAL BIDANG TANAH MENUJU PELAYANAN *ONLINE*
(Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

MOHAMAD FATRIYANTO MOODUTO

NIT. 16252994

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Kerangka Teoritik.....	8
1. Manajemen Perkantoran Modern.....	8
2. Manajemen Kearsipan.....	11
3. Pengelolaan Warkah/Arsip.....	15
4. Arsip Elektronik.....	19
5. Digitalisasi atau Alih Media Arsip.....	21
6. Integrasi Data Sistem Informasi Pertanahan	22
7. Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik/ <i>Online</i>	27
C. Kerangka Pemikiran.....	30
D. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Format Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan	35
1. Informan.....	35
2. Teknik Penentuan Informan.....	35
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	36

1.	Jenis dan Sumber Data	36
2.	Teknik Pengumpulan Data	36
E.	Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		39
A.	Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Bantul	39
B.	Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	41
1.	Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM).....	41
2.	Pelayanan Pertanahan.....	44
3.	Bidang Tanah Terdaftar dan Kualitas Data Pertanahan.....	48
4.	Ruang Warkah/Arsip.....	50
BAB V PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL		51
A.	Kondisi Warkah/Arsip Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	51
B.	Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Warkah Digital.....	55
1.	Sumber Daya Manusia (SDM).....	55
2.	Sarana dan Prasarana.....	56
3.	Anggaran	59
C.	Pelaksanaan Digitalisasi/Alih Media Warkah.....	60
1.	Persiapan	60
2.	Pemindaian (<i>scanning</i>) Warkah	60
3.	Penamaan <i>file</i> (<i>Indexing</i>).....	63
4.	Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>)	65
5.	Penyimpanan <i>File</i>	67
6.	Laporan/Daftar alih media warkah.....	68
D.	Validasi Data Pertanahan Elektronik	69
BAB VI SISTEM PENGELOLAAN WARKAH ELEKTRONIK/DIGITAL YANG TERINTEGRASI DALAM MENDUKUNG PELAYANAN ONLINE.....		77
A.	Sistem Pengelolaan Warkah Elektronik (Sloka Etnik).....	77
B.	Aplikasi Sloka Etnik Berbasis <i>Website</i> Yang Terintegrasi Dengan Data Spasial Bidang Tanah.....	87
C.	Analisis Pemanfaatan Warkah Digital/Elektronik Dalam Mendukung Layanan Pertanahan Berbasis Elektronik/ <i>Online</i>	91
BAB VII PENUTUP		95
A.	Kesimpulan.....	95
B.	Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA		97

ABSTRACT

The advancement of information and communication technology marked by the beginning of the fourth industrial revolution era or 4.0, where the efficiency of machines and humans began to connect to the internet. Industrial revolution 4.0 is the name given to the current trend of automation and data exchange. The ATR / BPN Ministry is currently continuing to develop various types of technological innovations, both for accelerating land registration and for public services. In the land service transformation road map from 2019 to 2024, one of the program priorities is the digitization of land documents. Managing documents digitally is one way to minimize space and save time in finding documents and can help speed up the process of completing work compared to manual / conventional management. The Bantul Regency Land Office is one of the offices that has started managing documents digitally. The purpose of this research is to find out how digital documents are managed and how they are used in order to support online-based land service activities. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach.

Based on the results of the research, the management of digital / electronic documents at the Bantul Regency Land Office begins with digitizing / transferring media, as well as digital / electronic data validation activities in the form of textual data validation of land books, measuring letters, and spatial data validation of parcels of land. The digitized document will then be uploaded into the website-based Electronic Document Management System (Sloka Etnik) application which is integrated with the spatial data of the land parcels. The use of digital / electronic documents in several land service activities is still constrained by the absence of regulations or implementing regulations. Electronic / online-based land services that have begun to be implemented at the Bantul Regency Land Office are Electronic Mortgage (HT-el) services, in HT-el service activities, where application files, products, data maintenance records, and mortgage land books are already in digital / electronic form.

Keywords: Document Digitization, Data Integration, Online Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan mulainya era revolusi industri keempat atau 4.0, dimana efisiensi mesin dan manusia mulai terhubung dengan internet. Revolusi industri 4.0 merupakan nama yang diberikan untuk tren otomatisasi dan pertukaran data saat ini. Revolusi industri tidak hanya merambah sektor industri tetapi juga merambah sektor pemerintahan. Menghadapi perkembangan teknologi ini Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Menghadapi revolusi industri 4.0, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terus berbenah dan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait pendaftaran tanah. Memahami pentingnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta digitalisasi data-data pertanahan menjadi hal yang penting dan harus segera dilaksanakan. Kegiatan pelayanan publik yang berbasis elektronik maupun *online*, merupakan penerapan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah lainnya yaitu *e-government (e-gov)*.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE (Pasal 1 (1) Perpres No.95 Tahun 2018). Sedangkan *e-government* menurut *World Bank* dalam Cahyadi (2003,4) adalah Penggunaan/ pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Transformasi menuju era digital juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen pertanahan yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di era moderen. Menurut Nurhadi (2019) Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, dalam siaran pers pada situs www.atrbpn.go.id, kondisi kantor pertanahan saat ini masih menyimpan dan mengatur warkah secara manual, beberapa kantor pertanahan sudah mendigitalisasikan dokumen warkah, tetapi belum semuanya. Upaya Kementerian ATR/BPN sesuai arahan pimpinan rapat saat Rapat Kerja Terbatas (RAKERTAS) adalah membuat *road map* transformasi dari tahun 2019 hingga 2024.

Digitalisasi warkah pertanahan merupakan salah satu hal *urgen* untuk segera dilaksanakan. Salah satu permasalahan yang melatarbelakangi yakni terkait dengan ruang penyimpanan yang membutuhkan ruangan khusus. Kegiatan permohonan pendaftaran tanah yang setiap tahunnya terus meningkat dan ditambah lagi dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Target PTSL dimana dari tahun 2017 hingga 2019 untuk seluruh wilayah di Indonesia telah mencapai 21 juta bidang tanah yang telah didaftar. Sementara itu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada tahun 2019 memiliki target PSTL sebanyak 73.000 bidang tanah yang tersebar di 25 desa/kelurahan. Peningkatan ini juga berdampak dalam pengarsipan dokumen pendaftaran tanah yang membuat ruang penyimpanan semakin sempit dan bahkan tidak lagi bisa menampung warkah/arsip kegiatan pendaftaran tanah tersebut. Hal ini menjadi masalah yang umum hampir pada setiap kantor pertanahan di seluruh Indonesia.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah melaksanakan pelayanan pertanahan berbasis elektronik/*online* dan juga mulai melaksanakan pengelolaan warkah secara digital. Kebijakan pelaksanaan pengelolaan warkah secara digital mengacu pada Surat Edaran

Nomor. 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. Surat Edaran ini dijadikan sebagai pedoman teknis pelaksanaan kegiatan digitalisasi/alih media dokumen pertanahan sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kegiatan pengelolaan warkah digital ini selain bertujuan untuk pengaman dari kerusakan fisik, memudahkan dalam pencarian, serta menjadi salah satu faktor pendukung dalam terwujudnya pelayanan pertanahan berbasis elektronik/*online*.

Integrasi antara arsip/dokumen pertanahan yang telah dilakukan digitalisasi/alih media juga penting dilaksanakan, dimana warkah, buku tanah, surat ukur, serta data spasial bidang tanah saling terkoneksi/terhubung satu dengan lainnya. Digitalisasi warkah/arsip saat ini dilakukan oleh masing-masing seksi pelaksana yang sesuai dengan tupoksinya, sehingga integrasi ini perlu dilakukan. Integrasi ini dilakukan selain bertujuan untuk membangun basis data informasi arsip pertanahan secara digital, serta dapat juga digunakan dalam upaya mendukung terlaksananya pelayanan pertanahan berbasis elektronik/*online*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Warkah Digital dan Integrasinya Dengan Data Spasial Bidang Tanah Menuju Pelayanan *Online* (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul)”**.

B. Rumusan Masalah

Sistem pengelolaan arsip secara manual/konvensional yang digunakan kantor pertanahan untuk mengelola warkah pertanahan dirasakan sudah tidak efektif dan tidak efisien lagi, karena membutuhkan banyak ruangan untuk penyimpanannya. Hal ini menyebabkan ruangan arsip kantor menjadi sempit serta petugas kesulitan jika mencari warkah/dokumen pertanahan yang dibutuhkan karena tidak disimpan dengan teratur.

Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. Warkah yang telah dilakukan digitalisasi atau alih media selanjutnya diintegrasikan dengan data spasial bidang tanah, yang kemudian nantinya dapat dimanfaatkan dalam upaya mendukung pelayanan pertanahan yang berbasis *online*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana integrasi warkah digital dengan data spasial bidang tanah dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pertanahan berbasis *online*.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Menambah kajian keilmuan tentang pengelolaan warkah/arsip pertanahan secara digital, serta pemanfaatannya dalam menunjang pelayanan pertanahan berbasis *online*.
 - b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota tentang pengelolaan warkah/arsip digital.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan warkah digital/elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dimulai dengan melakukan kegiatan digitalisasi/alih media, kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pemindaian (*scanning*) dokumen, penamaan *file* (*indexing*), pengendalian mutu (*quality control*), penyimpanan *file* dan pelaporan. Dokumen warkah yang sudah dilakukan digitalisasi selanjutnya diunggah kedalam aplikasi Sloka Etnik. Selain kegiatan digitalisasi dokumen warkah, dilakukan juga kegiatan validasi data digital/elektronik yang terdapat dalam aplikasi KKP, berupa validasi data tekstual buku tanah dan surat ukur, serta validasi data spasial persil bidang tanah.
2. Aplikasi Sistem Pengelolaan Warkah Elektronik (Sloka Etnik) berbasis *website* yang digunakan sudah terintegrasi dengan data tekstual maupun data spasial bidang tanah yang terdapat dalam pangkalan data (*database server*) di Kementerian ATR/BPN. Pemanfaatan warkah dalam bentuk digital/ elektronik pada beberapa kegiatan pelayanan pertanahan, masih terkendala belum adanya regulasi atau peraturan pelaksanaannya. Layanan pertanahan berbasis elektronik/*online* yang sudah mulai dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), dalam kegiatan layanan HT-el, dimana berkas permohonan, produk, pencacatan pemeliharaan data, dan buku tanah hak tanggungan sudah dalam bentuk digital/elektronik.

B. Saran

1. Perlu dilakukan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau bimbingan teknis (Bimtek) bagi petugas pelaksana pengelola warkah secara digital/elektronik, serta perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara bertahap akun pelaksana pada aplikasi Sistem Pengelolaan Warkah Digital (Sloka Etnik).
2. Perlu diusulkan kepada kepala kantor pertanahan untuk dapat meningkatkan kegiatan validasi data elektronik (data tekstual dan spasial), sebagai salah satu syarat untuk dapat terlaksananya kegiatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik/*online*.
3. Perlu diusulkan kepada Kementerian ATR/BPN untuk dapat mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait pemberlakuan buku tanah dan warkah pendaftaran secara elektronik/digital, pencatatan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara elektronik, serta peraturan mengenai penonaktifan dokumen fisik buku tanah yang sudah dilakukan kegiatan alih media/digitalisasi, sehingga seluruh kegiatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik/*online* dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, U 2019, 'Pengelolaan Warkah Digital Dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Provinsi Sumatera Selatan)', Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Cahyadi, A 2003, E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan, *Journal The Winners* Vol. 4, No.1, dilihat pada 05 april 2020, <https://www.researchgate.net/publication/318984998>
- Connolly, Thomas and Begg, Carolyn 2010, *Database Systems A Practical Approach to Design, Implementation, and Management Fifth Edition*, Pearson Education, Boston.
- Farhansyah, RM 2015, 'Pembuatan Aplikasi Pengarsipan Warkah Pendaftaran Tanah Secara Digital Menggunakan *Php Framework* Dan *Mysql*', Skripsi STPN, Yogyakarta.
- Gunawan, I 2015, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hariandja, MTE 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta
- Harminingtyas, R 2014, 'Analisis Layanan Website Sebagai Media Promosi, Media Transaksi Dan Media Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Brand Image Perusahaan Pada Hotel Ciputra Di Kota Semarang', *Jurnal STIE Semarang*, Vol. 2, No. 3, hlm. 37-57, dilihat pada 17 Juli 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/132337-ID-none.pdf>
- Moenir, AS 1992, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mahmudi 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, STIE YKPN, Jakarta.
- Masyhur NI, Kasim dan Irmawati 2015, 'Rancang Bangun *Web Service* (Studi Kasus : Layanan SIM Inventaris Barang)', *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika (SNKI)*, hlm. 51-55, dilihat pada 15 Juli 2020, <http://repository.poliupg.ac.id/id/eprint/323>
- Muhidin, SA 2019, *Teori dan Praktik Sistem Kearsipan*, Pustaka Setia, Bandung.

- Mustofa, FC 2015, 'Evaluasi pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) (*Evaluation of Land Information System development in National Land Agency of Indonesia*)', 25 Februari, dilihat pada 15 Juli 2020,
<https://www.researchgate.net/publication/322926148>
- Nugroho, A 2011, Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data, Andi, Yogyakarta.
- Pinuji, S 2016, 'Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy', *Jurnal Bhumi* Vol.2, No. 1, hlm. 48-64, dilihat pada 15 Juli 2020,
<http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JP/article/view/31/35>
- Satria, RJ 2018, 'Pemanfaatan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) Untuk Sistem Pengarsipan Warkah (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)', *Skripsi STPN*, Yogyakarta.
- Sedarmayanti 2008, Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern, Mandar Maju, Bandung.
- Sugiarto, A dan Wahyono, T 2014, Manajemen Kearsipan Elektronik, Gava Media, Yogyakarta.
- Sugiyono 2013, Metode Penelitian Pendidikan Manajemen, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2016, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Alfabet, Bandung.
- Tim Penulis 2013, Kamus Pertanahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Wahyuni 2017, 'Rekayasa Ulang (*Reengineering*) Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional Dengan Pendekatan *Unified Modelling Language* (UML)', *Jurnal Bhumi* Vol.3, No.1, hlm.111-121, dilihat pada 10 Juni 2020,
<http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/JP/article/view/94/118>
- Wursanto, IG 1991, *Kearsipan 1*, Kanisius, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 646/SK-DI.01.01/XII/2019 Tentang Penunjukan Kantor Pertanahan Lokasi Pelayanan Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik

Surat Edaran Nomor. 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 Tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah

Website

Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan Berbasis *Website* (KKP *web*), dapat diakses melalui alamat situs,

<http://kkp.atrbpn.go.id/>

Aplikasi Sistem Pengelolaan Warkah Elektronik (Sloka Etnik) berbasis *Website*, dapat diakses melalui alamat situs,

<https://slokaetnik.atrbpn.go.id/Dokumen/>

Hawlett Packard Enterprise (HPE), 2019, *Perbedaan Integrasi Data dan Sistem Integrasi*, diposting pada 6 Februari, dilihat pada 15 Juli 2020.

<http://hpe.berca.co.id/2019/02/06/perbedaan-integrasi-data-dan-sistem-integrasi/>

Kementerian ATR/BPN, 2019, *Digitalisasi Dokumen Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Lakukan Kajian Teknis*, diakses pada 07 Februari 2020,

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/digitalisasi-dokumen-pertanahan-kementerian-atrbpn-lakukan-kajian-teknis-99676>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, diakses pada 07 Februari 2020,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2015, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, dilihat pada tanggal 15 Juli 2020,

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline>